



**PEMERINTAH
KOTA PONTIANAK**

RENCANA KERJA TAHUNAN PERUBAHAN

TAHUN 2022

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PONTIANAK**

<https://diskominfo.pontianak.go.id/>

PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya semata, Dokumen “Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022” ini dapat diselesaikan. Rencana Kinerja Tahunan Perubahan merupakan dokumen rencana kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yang memuat sasaran Program, kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2022.

Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Kota Pontianak Tahun 2022 ini juga merupakan paparan agenda kerja dan target kinerja tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Kota Pontianak.

Rangkaian Tugas pokok tersebut terdokumentasikan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan Perubahan ini yang disusun berdasarkan usulan program dan kegiatan dari tiap Seksi dan atau Sub Bagian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Kota Pontianak, dengan memperhatikan aspek keselarasan program dan kegiatan antar unit kerja dalam penyelesaian tugas pokok dan fungsi masing masing.

Dalam program kerja ini juga disampaikan usulan rencana kegiatan yang merupakan penjabaran atas program dan tugas serta fungsi yang ada sesuai dengan kebutuhan yang senantitasa berkembang.

Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Tahun Anggaran 2022 ini juga merupakan penjabaran operasional kegiatan di tahun 2022 yang telah disusun bersama seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak serta menjadi acuan kerja dan target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Kota Pontianak.

Pontianak, Oktober 2022

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Pontianak

Drs. Zulkarnain, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660127 198603 1 009



DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Landasan Hukum	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II RENCANA STRATEGIS	6
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi	6
2.2 Tujuan dan Sasaran.....	7
BAB III RENCANA KINERJA TAHUNAN	9
3.1. Program dan Kegiatan	9
3.2 Indikator dan Target Kinerja Program dan Kegiatan	12
BAB IV PENUTUP	23
LAMPIRAN	24

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Logical Frame Work Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pontianak Dan Pencapaian Misi Kota Pontianak Tahun 2022.....	8
Tabel 3.1 Target Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13
Tabel 3.2 Target Kinerja Program Aplikasi Informatika	16
Tabel 3.3 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	18
Tabel 3.4 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	19
Tabel 3.5 Target Kinerja Program Informasi dan Komunikasi Publik	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Rencana Kinerja Tahunan SKPD merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan SKPD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (SKPD) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 86 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, dengan struktur organisasinya terdiri atas Sekretariat, dan tiga bidang, yaitu: Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika, dan Bidang Statistik Sektoral.

Pemerintah Daerah Kota Pontianak memiliki visi yaitu "Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat". Sebagai implementasi lanjut dari visi tersebut, maka dirumuskan misi yang memperjelas rincian tujuandan sasaran pembangunan kesehatan, sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya;
2. Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representative.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi, serta aparatur yang berintegritas, bersih, dan cerdas.
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera, yang mandiri, kreatif, dan berdaya saing
5. Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib, dan berkelanjutan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak mendukung perwujudan visi dan misi ke 3 dari Pemerintah Kota Pontianak. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

Penyusunan rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak (RENSTRA), kemudian dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja dan Rencana Kinerja Tahunan Perubahan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak juga melaksanakan penyusunan Dokumen Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kinerja Tahunan. Sebagai salah satu dokumen perencanaan, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Perubahan.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak juga menjadi satu diantara komponen sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menetapkan target sasaran program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika untuk periode waktu 1 (satu) tahun kedepan dan akan menjadi dasar dalam penentuan perjanjian kinerja yang akan dievaluasi melalui pelaporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP) tahun 2022.

1.2 Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Tahun Anggaran 2021 ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap instansi/lembaga pemerintah berdasarkan dengan Instruksi Presiden RI Nomor: 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Kinerja Tahunan Perubahan menjadi penjabaran dari Rencana Strategis pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, dan menjadi acuan dalam penyusunan penetapan kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 ini adalah:

- a. sebagai pedoman dan acuan untuk penyelenggaraan kegiatan selama Tahun Anggaran 2021 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021.
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.
- c. Meningkatkan ketertiban dan transparansi serta akuntabilitas kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

1.3 Landasan Hukum

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Tahun Anggaran 2022 ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9).
7. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 117).
9. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 20 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 20 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022;

11. Peraturan Wali Kota Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 116);
12. Peraturan Walikota Nomor 140 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pontianak Nomor 140 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Tahun Anggaran 2022 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang penyusunan RKT Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum yang digunakan untuk penyusunannya, dan sistematika penulisan dokumen RKT ini.

BAB II RENCANA KERJA

Pada bagian ini dijelaskan mengenai sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, program serta kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

BAB III RENCANA KINERJA TAHUNAN PERUBAHAN

Menjabarkan rencana program dan kegiatan serta target indikator kinerja yang ditentukan pada tahun 2022

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini disampaikan catatan-catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

RENCANA STRATEGIS

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

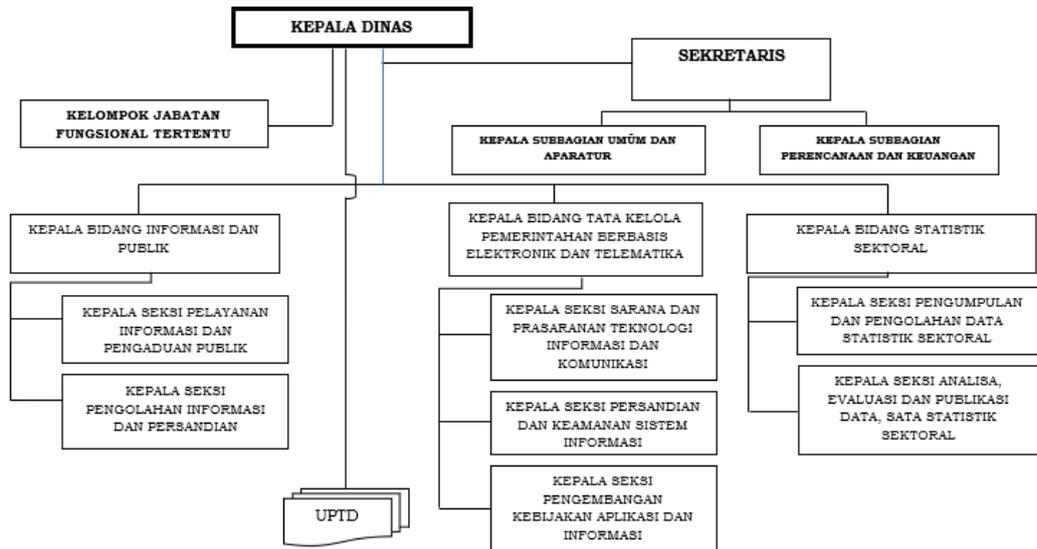
Sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Walikota Pontianak Peraturan Wali Kota Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 116), Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang informasi, bidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang informasi, bidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang informasi, bidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sesuai dengan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 86 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, maka struktur organisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak adalah sebagaimana bagan 2.1.

Gambar. 2
Struktur Organisasi
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak



Gambar II.1 Struktur Organisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

2.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan implementasi/penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai dan menghasilkan apa, dalam kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024 dalam mensinergikan misi RPJMD Kota Pontianak yang ke 3 (tiga) yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas adalah untuk Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak berupaya untuk mewujudkan sasaran yang dirumuskan untuk dicapai dalam kurun waktu 2020-2024. Sasaran tersebut adalah:

1. Meningkatkan Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien
2. Transparansi Informasi Publik

Lebih jelasnya sebagaimana tercantum pada gambar 2.2.

Tabel 2.1
LOGICAL FRAME WORK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK
DAN PENCAPAIAN MISI KOTA PONTIANAK TAHUN 2022

TUJUAN	SASARAN	IKU KOTA	TARGET IKU	SASARAN OPD	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG
Misi 3 :	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas					
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	77,74	Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Program Aplikasi Informatika Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik	Transparansi Informasi Publik	Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial

Gambar II.2 Logical Framework Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUNAN PERUBAHAN

3.1. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, sebagaimana yang tercantum pada dokumen Perubahan Rencana Strategis pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2020-2024, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Aplikasi Informatika
 - 2.1. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
 - Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

- 2.2. Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
 - Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah
 - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
 - Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
 - Pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
3. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
 - 3.1. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
 - 3.2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah daerah kabupaten/Kota
4. Program Informasi Dan Komunikasi Publik
 - 4.1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
 - Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

- Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - Pelayanan Informasi Publik
 - Layanan Hubungan Media
 - Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
 - Manajemen Komunikasi Krisis
 - Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
5. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- 5.1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
 - Peningkatan Kapasitas SDM PEMDA dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
 - Membangun Metadata Statistik Sektoral
 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
 - Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah

Dan seiring dengan adanya perubahan anggaran, terdapat beberapa sub kegiatan yang ditiadakan menyesuaikan dengan alokasi anggaran pada APBD-Perubahan Tahun 2022, yaitu:

- Urusan Penunjang
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Urusan Statistik Sektoral
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM PEMDA dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi

3.2 Indikator dan Target Kinerja Program dan Kegiatan

Pada perubahan tahun anggaran 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak memiliki 5 program dan 13 kegiatan serta 51 sub kegiatan. Untuk rincian target kinerja program dan kegiatan dapat dilihat sebagaimana terlampir berikut ini.

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pada program Penunjang Urusan Pemerintah meliputi pelaksanaan kegiatan rutin yang dilaksanakan perangkat kerja, dimana terdapat 5 kegiatan dan 33 sub kegiatan. Adapun indikator kinerja hasil Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah berupa Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan sebesar 94%.

Tabel 3.1

Target Kinerja dan Anggaran Perubahan

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Perubahan		Anggaran Renja	Keterangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	92	persen	5.488.765.184	Sekretariat
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	18	dokumen	31.120.600	Subbag Perencanaan dan Keuangan
Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7	Dokumen	8.011.800	Subbag Perencanaan dan Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah sub kegiatan pada dokumen RKA SKPD yang disusun	60	Sub Kegiatan	2.800.000	Subbag Perencanaan dan Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah sub kegiatan yang berubah pada dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	20	Sub Kegiatan	4.300.000	Subbag Perencanaan dan Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah kegiatan pada dokumen DPA SKPD yang disusun	13	Kegiatan	2.300.000	Subbag Perencanaan dan Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah kegiatan yang berubah pada dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	9	Kegiatan	2.300.000	Subbag Perencanaan dan Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	5	Laporan	5.923.800	Subbag Perencanaan dan Keuangan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6	Laporan	5.485.000	Subbag Perencanaan dan Keuangan

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Perubahan		Anggaran Renja	Keterangan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12	bulan	4.547.257.284	Subbag Perencanaan dan Keuangan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan	12	bulan	4.257.730.284	Subbag Perencanaan dan Keuangan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jangka waktu penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	bulan	21.600.000	Subbag Perencanaan dan Keuangan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12	bulan	253.800.000	Subbag Perencanaan dan Keuangan
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jangka waktu Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	bulan	3.180.000	Subbag Perencanaan dan Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	1.089.000	Subbag Perencanaan dan Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12	laporan	9.858.000	Subbag Perencanaan dan Keuangan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	bulan	70.980.000	Subbag Umum dan Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	85	stel	52.980.000	Subbag Umum dan Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal	3	ASN	18.000.000	Subbag Umum dan Aparatur
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu pelayanan administrasi umum perangkat daerah	12	bulan	230.913.286	Subbag Umum dan Aparatur
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jangka waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	bulan	8.001.268	Subbag Umum dan Aparatur
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0	unit	-	Subbag Umum dan Aparatur
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	12	bulan	136.117.813	Subbag Umum dan Aparatur

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Perubahan		Anggaran Renja	Keterangan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	27.541.955	Subbag Umum dan Aparatur
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	bulan	8.880.000	Subbag Umum dan Aparatur
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12	bulan	50.372.250	Subbag Umum dan Aparatur
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33	unit	237.261.648	Subbag Umum dan Aparatur
Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebel	-	unit		Subbag Umum dan Aparatur
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	33	unit	237.261.648	Subbag Umum dan Aparatur
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah unit pengadaan aset tetap tak berwujud	-	unit		Subbag Umum dan Aparatur
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12	bulan	293.297.120	Subbag Umum dan Aparatur
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	12	bulan	5.000.000	Subbag Umum dan Aparatur
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	12	bulan	31.200.000	Subbag Umum dan Aparatur
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	bulan	257.097.120	Subbag Umum dan Aparatur
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	43	Unit	77.935.246	Subbag Umum dan Aparatur
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	2	unit	36.702.746	Subbag Umum dan Aparatur
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	41	unit	41.232.500	Subbag Umum dan Aparatur

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Perubahan		Anggaran Renja	Keterangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0	unit	-	Subbag Umum dan Aparatur

b. Program Target Kinerja Program Aplikasi Informatika

Program Aplikasi Informatika dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan diikuti sebanyak 9 sub kegiatan, dari program ini dilaksanakan untuk menunjang program pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika berupa pengembangan aplikasi. Adapun indikator kinerja hasil Program Aplikasi Informatika berupa Persentase jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE sebesar 94%.

Tabel 3.2
Target Kinerja dan Anggaran Perubahan
Program Aplikasi Informatika

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Perubahan			Penanggungjawab
			Target		Rp	
I	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE	91	Persen	2.329.990.950	Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
1.1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah domain / sub domain pemerintah daerah yang dikelola	29	Domain / Sub Domain	319.465.670	Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
1.1.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah domain / sub domain pemerintah daerah yang dikelola	29	domain / sub domain	109.184.330	Seksi Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Perubahan			Penanggungjawab
			Target		Rp	
1.1.2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang sudah terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	5	OPD	210.281.340	Seksi Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi
1.2	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah layanan publik dan administrasi yang terintegrasi	1	Aplikasi / Layanan Publik	2.010.525.280	Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
1.2.2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah pelaksanaan pengawasan e-government	30	OPD	1.473.314.480	Seksi Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi
1.2.3	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah dan Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	2	Aplikasi	125.390.000	Seksi Pengembangan Kebijakan dan Aplikasi Informatika
1.2.4	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Aplikasi / Sistem penghubung Layanan Pemerintah	1	Aplikasi	3.676.000	Seksi Pengembangan Kebijakan dan Aplikasi Informatika
1.2.5	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Program Kegiatan terkait pelaksanaan Smart City	25	OPD	323.374.800	Seksi Pengembangan Kebijakan dan Aplikasi Informatika
1.2.6	Pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	5	sistem	54.240.000	Seksi Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi
1.2.7	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi SPBE	1	laporan	30.530.000	Seksi Pengembangan Kebijakan dan Aplikasi Informatika

c. Program Target Kinerja Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan diikuti sebanyak 4 sub kegiatan, dari program ini dilaksanakan untuk menunjang program pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika berupa pengamanan informasi. Adapun Indikator hasil kinerja Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi berupa Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah dengan target capaian cukup baik.

Tabel 3.3
Target Kinerja dan Anggaran Perubahan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Perubahan			Penanggungjawab
			Target		Rp	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah	Cukup Baik	Indeks	169.013.406	Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
2.1	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah area informasi yang telah diamankan dengan persandian	1	area	144.378.992	Seksi Persandian dan Keamanan Sistem Informasi
2.1.1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah	1	dokumen	7.000.000	Seksi Persandian dan Keamanan Sistem Informasi
2.1.2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	jumlah sistem elektronik / sistem informasi yang telah diaudit dengan resiko rendah	24	sistem	41.450.000	Seksi Persandian dan Keamanan Sistem Informasi

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Perubahan		Penanggungjawab	
			Target	Rp		
2.1.3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	jumlah aplikasi / sistem elektronik / kegiatan strategis non elektronik / titik komunikasi yang diamankan melalui pengamanan sinyal dan menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) berdasarkan PHKS	6	sistem/ kegiatan	86.504.992	Seksi Persandian dan Keamanan Sistem Informasi
2.1.4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat elektronik yang diterbitkan untuk pengamanan informasi daerah	7	sertifikat	9.424.000	
2.2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan pola hubungan komunikasi sandi (PHKS)	5	Perangkat Daerah	24.634.414	Kasi Persandian dan Keamanan Sistem Informasi
2.2.1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Jangka waktu Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12	bulan	24.634.414	

d. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan diikuti sebanyak 5 sub kegiatan, dari program ini dilaksanakan untuk menunjang program pembangunan bidang Statistik Sektoral berupa tingkat penyebaran data dan informasi. Pada anggaran perubahan tahun 2022 ini terdapat 1 sub kegiatan yang tidak lagi dilaksanakan yaitu sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM PEMDA dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi. Dan pada sub kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah ekspose data

statistic sectoral juga ditiadakan seiring dengan pengurangan anggaran yang dilakukan sehingga terjadi perubahan target kinerja.

Adapun Indikator hasil Kinerja Program Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial berupa Presentase Tingkat terselenggaranya kegiatan Statistik Sektorial Kota Pontianak dengan target kinerja sebesar 92%.

Tabel 3.4
Target Kinerja dan Anggaran Perubahan
Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Perubahan			Penanggungjawab
			Target		Rp	
4	PROGRAM PENYELENGGA RAAN STATISTIK SEKTORAL	Presentase Tingkat terselenggaranya kegiatan Statistik Sektorial Kota Pontianak	90	persen	462.931.079	Bidang Statistik Sektorial
4.1	Penyelenggaraan Statistik Sektorial di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah data statistik sektoral di Kota Pontianak yang terbaru/ terupdate	800	data	462.931.079	Bidang Statistik Sektorial
4.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektorial	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral dan pelaksanaan Forum Data Kota Pontianak	4	Kali	135.046.230	Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data
4.1.2	Peningkatan Kapasitas SDM PEMDA dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah bimtek, sosialisasi dan pendampingan pengumpulan data statistik sektoral yang diselenggarakan	0	kali	-	Seksi Analisa, Evaluasi dan Publikasi
4.1.3	Membangun Metadata Statistik Sektorial	Jumlah Buku Metadata kegiatan statistik sektoral dan Buku Metadata Satu Data	100	buku	41.590.000	Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data
4.1.4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektorial	Jumlah Buku Updating Data Statistik Sektorial, Buku Data Dinamis dan Buku Kota	250	buku	71.520.000	Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Perubahan			Penanggungjawab
			Target		Rp	
		Pontianak Dalam Angka				
4.1.5	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	1) Jumlah Buku Profil Daerah;	100	buku	214.774.849	Seksi Analisa, Evaluasi dan Publikasi
		2) Jumlah Data yang sudah terintegrasi pada portal satu data Kota Pontianak;	800	data		
		3) Jumlah Expose Data Statistik Sektoral	0	kali		

e. Program Informasi Dan Komunikasi Publik

Program Informasi Dan Komunikasi Publik dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan diikuti sebanyak 7 sub kegiatan, dari program ini dilaksanakan untuk menunjang program pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika berupa tingkat penyebaran informasi. Adapun Indikator hasil Kinerja Program Informasi Dan Komunikasi Publik berupa Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah dengan target capaian 90%.

Tabel 3.5
Target Kinerja Program Informasi dan Komunikasi Publik

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2022) yang dievaluasi			Penanggungjawab
			Target		Rp	
3	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	90	persen	593.917.000	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2022) yang dievaluasi		Penanggungjawab	
			Target	Rp		
3.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah informasi publik pemerintah daerah yang dikelola dan dipublikasikan kepada masyarakat	12	informasi	593.917.000	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
3.1.1	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan strategi komunikasi	9	konten	292.028.000	Seksi Pengolahan Informasi dan Kemitraan Media
3.1.2	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi	2	kali / media	47.927.800	Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Publik
3.1.3	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah pengaduan masyarakat yang diverifikasi	135	pengaduan	100.574.150	Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Publik
3.1.4	Layanan Hubungan Media	Jumlah siaran pers yang dilakukan	3	kali	58.030.000	Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Publik
3.1.5	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	jumlah komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi kebijakan pemerintah	2	komunitas	23.450.000	Seksi Pengolahan Informasi dan Kemitraan Media
3.1.6	Manajemen Komunikasi Krisis	jumlah dokumen laporan pengelolaan komunikasi krisis Kota Pontianak	2	dokumen	48.272.250	Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Publik
3.1.7	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah informasi dan dokumentasi yang disampaikan melalui media PPID	12	informasi	23.634.800	Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Publik

BAB IV

PENUTUP

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja (Renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan.

Di dalam Renja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan Renja dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran.

Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2022 perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2022 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (target setting) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2022 disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (good governance) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.

LAMPIRAN
RENCANA KINERJA TAHUNAN PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2022)		Penanggungjawab	
				K	Rp		
1	2	3	4	5		6	
1.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase tingkat Kepuasan Bidang / Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	94	persen	5.488.765.184	SEKRETARIAT
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	22	Dokumen	31.120.600	SEKRETARIAT
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7	Dokumen	8.011.800	Subbag Perencanaan dan Keuangan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah sub kegiatan pada dokumen RKA SKPD yang disusun	60	Sub kegiatan	2.800.000	Subbag Perencanaan dan Keuangan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah sub kegiatan yang berubah pada dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	30	Sub kegiatan	4.300.000	Subbag Perencanaan dan Keuangan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah kegiatan pada dokumen DPA SKPD yang disusun	13	Kegiatan	2.300.000	Subbag Perencanaan dan Keuangan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah kegiatan yang berubah pada dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	12	Kegiatan	2.300.000	Subbag Perencanaan dan Keuangan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	5	Laporan	5.923.800	Subbag Perencanaan dan Keuangan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2022)			Penanggungjawab
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6	Laporan	5.485.000	Subbag Perencanaan dan Keuangan
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu pemenuhan operasional Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	bulan	4.547.257.284	SEKRETARIAT
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan	12	bulan	4.257.730.284	Subbag Perencanaan dan Keuangan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jangka waktu penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	bulan	21.600.000	Subbag Perencanaan dan Keuangan
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	12	bulan	253.800.000	Subbag Perencanaan dan Keuangan
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jangka waktu pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	bulan	3.180.000	Subbag Perencanaan dan Keuangan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1.089.000	Subbag Perencanaan dan Keuangan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12	Laporan	9.858.000	Subbag Perencanaan dan Keuangan
Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jangka waktu pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	bulan	70.980.000	SEKRETARIAT	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	85	stel	52.980.000	Subbag Umum dan Aparatur	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal	3	orang	18.000.000	Subbag Umum dan Aparatur	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2022)			Penanggungjawab
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	Administrasi Umum	Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	bulan	230.913.286	SEKRETARIAT
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jangka waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	bulan	8.001.268	Subbag Umum dan Aparatur
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0	Unit	-	Subbag Umum dan Aparatur
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah unit peralatan rumah tangga yang disediakan	0	Unit	-	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	12	bulan	136.117.813	Subbag Umum dan Aparatur
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	27.541.955	Subbag Umum dan Aparatur
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	bulan	8.880.000	Subbag Umum dan Aparatur
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12	bulan	50.372.250	Subbag Umum dan Aparatur
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	32	unit	237.261.648
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan		0	unit	-	Subbag Umum dan Aparatur	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2022)		Penanggungjawab	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6	unit	237.261.648	Subbag Umum dan Aparatur
			Pengadaan Aset Tak Berwujud		Jumlah unit pengadaan aset tetap tak berwujud	0	unit	-	Subbag Umum dan Aparatur
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jangka Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	bulan	293.297.120	SEKRETARIAT
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	12	bulan	5.000.000	Subbag Umum dan Aparatur
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	12	bulan	31.200.000	Subbag Umum dan Aparatur
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	bulan	257.097.120	Subbag Umum dan Aparatur
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	43	unit	77.935.246	SEKRETARIAT
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	2	unit	36.702.746	Subbag Umum dan Aparatur
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	41	unit	41.232.500	Subbag Umum dan Aparatur
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1	unit	-	Subbag Umum dan Aparatur

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2022)			Penanggungjawab	
	Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman efektif dan efisien	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE	94	Persen	2.329.990.950	BIDANG TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DAN TELEMATIKA	
			Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah domain pemerintah pusat dan sub domain pemerintah daerah yang dikelola dan terkoneksi dalam jaringan intra pemerintah daerah	29	Domain / Sub Domain	319.465.670	BIDANG TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DAN TELEMATIKA
			Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah domain / sub domain pemerintah daerah yang dikelola	29	domain / sub domain	109.184.330	SUB SUBSTANSI SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
			Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang sudah terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	5	OPD	210.281.340	SUB SUBSTANSI SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
			Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah layanan publik dan administrasi yang terintegrasi	1	Aplikasi / Layanan Publik	2.010.525.280	BIDANG TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DAN TELEMATIKA
			Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah dan Jumlah perangkat daerah yang	30	OPD	1.473.314.480	SUB SUBSTANSI SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2022)			Penanggungjawab
			menyimpan data di pusat data pemerintah				
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi/Sistem elektronik yang dikembangkan dan sesuai dengan peraturan	2	Aplikasi	125.390.000	SUB SUBSTANSI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN APLIKASI INFORMATIKA
		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Aplikasi / Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	1	Aplikasi	3.676.000	SUB SUBSTANSI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN APLIKASI INFORMATIKA
		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Program Kegiatan terkait pelaksanaan Smart City	25	OPD	323.374.800	SUB SUBSTANSI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN APLIKASI INFORMATIKA
		Pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	5	sistem/OPD	54.240.000	SUB SUBSTANSI SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi SPBE	1	Laporan	30.530.000	SUB SUBSTANSI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN APLIKASI INFORMATIKA

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2022)			Penanggungjawab
				Cukup Baik	Indeks		
	Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman efektif dan efisien	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah	Cukup Baik	Indeks	169.013.406	BIDANG TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DAN TELEMATIKA
		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah area informasi yang telah diamankan dengan persandian	1	area	144.378.992	BIDANG TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DAN TELEMATIKA
		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah	1	dokumen	7.000.000	SUB SUBSTANSI PERSANDIAN DAN KEAMANAN SISTEM INFORMASI
		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sistem elektronik / sistem informasi yang telah diaudit dengan resiko rendah	24	sistem	41.450.000	SUB SUBSTANSI PERSANDIAN DAN KEAMANAN SISTEM INFORMASI
		Pelaksanaan Kemanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	jumlah aplikasi / sistem elektronik / kegiatan strategis non elektronik / titik komunikasi yang diamankan melalui pengamanan sinyal dan menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) berdasarkan PHKS	6	sistem / kegiatan	86.504.992	SUB SUBSTANSI PERSANDIAN DAN KEAMANAN SISTEM INFORMASI

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2022)			Penanggungjawab
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sertifikat elektronik yang diterbitkan untuk pengamanan informasi daerah	7	Sertifikat elektronik	9.424.000	SUB SUBSTANSI PERSANDIAN DAN KEAMANAN SISTEM INFORMASI
	Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman efektif dan efisien	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan pola hubungan komunikasi sandi (PHKS)	5	Perangkat Daerah	24.634.414	BIDANG TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DAN TELEMATIKA
		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jangka waktu Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12	bulan	24.634.414	SUB SUBSTANSI PERSANDIAN DAN KEAMANAN SISTEM INFORMASI
	Transparansi Informasi Publik	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	90	persen	593.917.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah informasi publik pemerintah daerah yang dikelola dan dipublikasikan kepada masyarakat	12	informasi	593.917.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan strategi komunikasi	12	konten	292.028.000	SUB SUBSTANSI PENGOLAHAN INFORMASI DAN KEMITRAAN MEDIA
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi	4	kali / media	47.927.800	SUB SUBSTANSI PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN PUBLIK

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2022)			Penanggungjawab
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah pengaduan masyarakat yang diverifikasi	135	pengaduan	100.574.150	SUB SUBSTANSI PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN PUBLIK
		Layanan Hubungan Media	Jumlah siaran pers yang dilakukan	7	kali	58.030.000	SUB SUBSTANSI PENGOLAHAN INFORMASI DAN KEMITRAAN MEDIA
		Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	jumlah komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi kebijakan pemerintah	6	komunitas	23.450.000	SUB SUBSTANSI PENGOLAHAN INFORMASI DAN KEMITRAAN MEDIA
		Manajemen Komunikasi Krisis	jumlah dokumen laporan pengelolaan komunikasi krisis Kota Pontianak	3	dokumen	48.272.250	SUB SUBSTANSI PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN PUBLIK
		Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah informasi dan dokumentasi yang disampaikan melalui media PPID	45	informasi	23.634.800	SUB SUBSTANSI PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN PUBLIK
	Transparansi Informasi Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Presentase Tingkat terselenggaranya kegiatan Statistik Sektoral Kota Pontianak	92	persen	462.931.079	BIDANG STATISTIK SEKTORAL
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah data statistik sektoral di Kota Pontianak yang terbaru/terupdate	800	data	462.931.079	BIDANG STATISTIK SEKTORAL

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2022)			Penanggungjawab		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral dan pelaksanaan Forum Data Kota Pontianak	4	Kali	135.046.230	SUB SUBSTANSI PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA STATISTIK SEKTORAL
			Peningkatan Kapasitas SDM PEMDA dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		Jumlah bimtek, sosialisasi dan pendampingan pengumpulan data statistik sektoral yang diselenggarakan	0	kali	-	SUB SUBSTANSI ANALISA, EVALUASI DAN PUBLIKASI DATA STATISTIK SEKTORAL
			Membangun Metadata Statistik Sektoral		Jumlah Buku Metadata kegiatan statistik sektoral dan Buku Metadata Satu Data	100	buku	41.590.000	SUB SUBSTANSI PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA STATISTIK SEKTORAL
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		Jumlah Buku Updating Data Statistik Sektoral, Buku Data Dinamis dan Buku Kota Pontianak Dalam Angka	250	buku	71.520.000	SUB SUBSTANSI PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA STATISTIK SEKTORAL
			Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah		1) Jumlah Buku Profil Daerah;	100	buku	214.774.849	SUB SUBSTANSI ANALISA, EVALUASI DAN PUBLIKASI DATA STATISTIK SEKTORAL
					2) Jumlah Data yang sudah terintegrasi pada portal satu data Kota Pontianak;	800	data		
					3) Jumlah Expose Data Statistik Sektoral	0	kali		
TOTAL ANGGARAN								9.044.617.619	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2022)		Penanggungjawab



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PONTIANAK**
<https://diskominfo.pontianak.go.id/>